

## MENAKAR KESIAPAN PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA MENUJU NEGARA MAJU

**Audia Junita\***

FEB Universitas Harapan Medan

Jln. Imam Bonjol 35 Medan

Email: audi.junita@gmail.com

### ABSTRACT

*In the early 2020s, the United States established Indonesia as a developed country, whereas according to the United Nations Development Program and World Bank measures, Indonesia was still in the category of developing countries. Based on this, by using a literature study, this article wants to review how the characteristics that distinguish a developed or developing country, why Indonesia has not been able to become a developed country, what problems have faced Indonesia so far, and what strategies should be done by Indonesia to become a developed country. The results prove that developed and developing countries have differences in carrying out human development. Problems faced by Indonesia in the aspects of health, education, and living standards are related, among others, to the distribution and financing of services, and the country's efforts to create jobs and encourage production and consumption. The findings imply the need to improve the quality of policies and institutional capabilities of public services oriented towards equitable distribution and improvement of service quality of the basic needs of the community towards meeting human development standards.*

**Keywords: human development, Indonesia, developed countries**

## PENDAHULUAN

Dikotomi jargon negara maju dan berkembang secara hirarkis yang menempatkan kedua kelompok Negara berada pada level *up and down*, di era globalisasi ekonomi seperti saat ini, menjadi pertanyaan apakah masih bermakna? Era globalisasi seyogyanya dicirikan dengan integrasi ekonomi dan saling ketergantungan dalam hal pergerakan barang, jasa, teknologi dan modal melewati batas – batas antar Negara (Joshi, 2009). Dengan demikian bukan hanya Negara berkembang yang membutuhkan Negara maju, namun juga sebaliknya. Negara-negara maju membutuhkan ruang untuk ekspansi pasar berbagai produk Negara mereka termasuk teknologi. Interaksi dan kerja sama antar Negara menjadi kebutuhan di era globalisasi.

Namun, dikotomi tersebut dinilai masih relevan dengan menempatkannya sebagai upaya *benchmarking* Negara-negara berkembang atas berbagai kebijakan dalam Negara dibandingkan dengan kelompok Negara yang dinilai terbaik di dunia yaitu Negara maju. Menurut Vázquez & Sumner (2016), setidaknya ada 2 tujuan pengklasifikasian Negara di dunia yaitu tujuan analitis untuk mengidentifikasi kebutuhan/masalah pengembangan dalam negara yang senantiasa berubah, dan tujuan operasional untuk mengidentifikasi strategi pengembangan spesifik dalam kelompok tertentu yang mengarahkan pada inisiatif kerjasama.

Berbagai dasar pengklasifikasian Negara maju dan berkembang dikemukakan oleh lembaga-lembaga Internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP), Bank Dunia, dan *International Monetary Fund* (IMF) dengan ambang batas kategorisasi yang berbeda satu dan lainnya berkembang dari waktu ke waktu (Tabel 1) (Agussalim, 2019; Vázquez & Sumner, 2016; Nielsen, 2011; The World Bank, 2020a). Lembaga-lembaga tersebut menentukan indikator pengklasifikasian tidak hanya berorientasi pada ukuran kuantitatif antara lain pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat namun juga menyeimbangkan dengan mengadopsi ukuran-ukuran yang bersifat humanistik seperti kemampuan literasi, harapan hidup, kesehatan, nutrisi dan lain sebagainya. Sayangnya, standar pengukuran untuk membuat dikotomi negara maju dan berkembang berbeda satu sama lainnya sehingga menghasilkan konsepsi yang juga berbeda.



**Tabel 1.** Sistem Klasifikasi Negara oleh UNDP, Bank Dunia, dan IMF

Aspek	UNDP	World Bank	IMF
Label ‘Negara Maju’	Negara Maju (Very High Human Development)	Negara Berpendapatan Tinggi	Negara yang Telah Maju
Label ‘Negara Berkembang’	Negara Berkembang	Negara Berpendapatan Menengah ke Bawah	Negara yang baru muncul dan berkembang
Ambang Batas Perkembangan	75 % dalam distribusi Human Development index (HDI)	Pendapatan US\$6,000 per Kapita dengan harga di Tahun 1987 atau US\$ 12.235*	Tidak Dinyatakan
Kategorisasi ‘Negara Berkembang’	1) Negara dengan tingkat pembangunan manusia yang rendah, 2) Negara dengan tingkat pembangunan manusia menengah, dan 3) Negara dengan tingkat pembangunan manusia tinggi	1) Negara berpendapatan menengah ke bawah, dan 2) Negara berpendapatan menengah ke atas*	1) Negara berkembang dengan pendapatan rendah, dan 2) Negara baru dan berkembang lainnya

Sumber: Agussalim (2019), Nielsen (2011), The World Bank (2020a)\*

Pertanyaan menggelitik muncul ketika Indonesia dikeluarkan oleh Amerika Serikat dari kelompok Negara berkembang dan ditasbihkan sebagai negara maju versi Amerika dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi dan keikutsertaan dalam aktivitas kelompok perdagangan global (IDNFinancial, 2020). Sementara berdasarkan *Human Development Report 2019 (United Nations Development Programme, 2019)* yang seringkali menjadi lembaga Internasional acuan untuk menentukan apakah sebuah negara maju atau tidak dari perspektif pembangunan manusia, sebuah negara masuk dalam kategori negara maju (*very high development*) jika memiliki nilai *Human Development Index (HDI) > 0,75*. Sementara jika dilihat dari kategori yang ditentukan oleh World Bank dimana negara maju dan berkembang dikelompokkan berdasarkan tingkat pendapatan per kapita masyarakat, maka sebuah negara dikategorikan maju (*high income*) jika pendapatan nasional bruto per kapita masyarakatnya  $> \text{US\$ } 12.235$  dan termasuk kategori negara berkembang jika pendapatan nasional bruto per kapita masyarakatnya  $\leq \text{US\$ } 12.235$  (The World Bank, 2020a). Masih menurut World Bank, kategori negara berkembang meliputi negara berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income*) dengan pendapatan nasional per kapita masyarakat  $\text{US\$ } 3.956 - \text{US\$ } 12.235$ , dan negara berpendapatan menengah ke bawah (*lower middle income*) dengan rentang pendapatan nasional per kapita masyarakatnya sebesar  $\text{US\$ } 1.006 - \text{US\$ } 3.956$ .

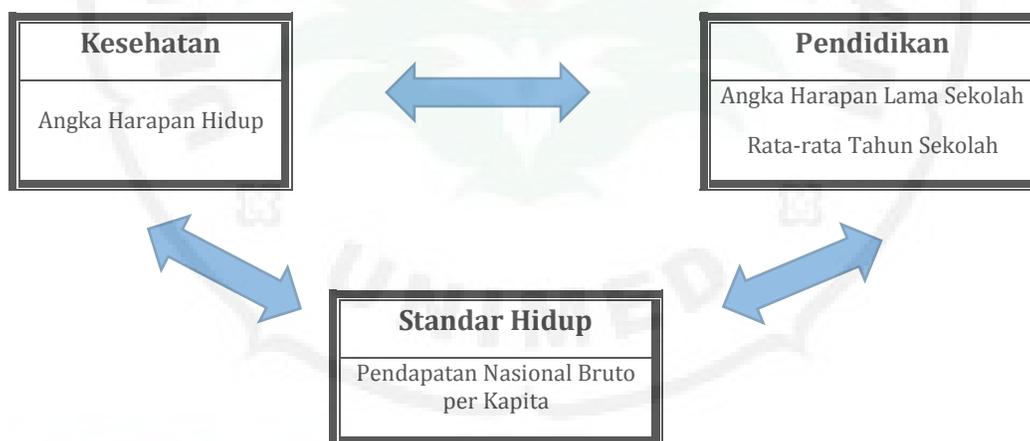
Mengacu pada ambang batas pengklasifikasian yang ditentukan oleh United Nation Development Programme (UNDP) dan World Bank dan dibandingkan dengan data capaian

negara Indonesia untuk HDI sebesar 0,707 atau  $< 0,75$ , berada di peringkat ke-111 dari 189 negara, angka harapan hidup masyarakat di usia 71,5 tahun, rata-rata tahun sekolah adalah 8 tahun, dan pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia berkisar US\$ 11,256 atau Rp 157 juta per kepala, maka lebih tepat kiranya jika Indonesia saat ini dikategorikan sebagai negara berkembang, lebih spesifik, negara berkembang dengan tingkat pembangunan manusia tinggi (*high human development*) (*United Nation Development Program, 2019*) dan berpendapatan menengah ke atas (*upper middle income*) (*The World Bank, 2020a*).

Kualitas pembangunan manusia oleh UNDP diukur dengan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi pengukuran atas kapasitas penduduk di sebuah Negara dalam mengakses hasil pembangunan terkait dengan 3 dimensi yaitu standar hidup (pendapatan Nasional bruto per kapita), kesehatan (harapan hidup), dan pendidikan (angka harapan lama sekolah dibandingkan rata-rata tahun sekolah) (Badan Pusat Statistik, 2020; Asadi & Marin, 2019) (Gambar 1). IPM mewakili ukuran kapasitas negara dalam melakukan pengembangan manusia.

### Gambar 1. Dimensi dan Indikator Indeks Pembangunan Manusia

Sumber: UNDP Report (Berbagai Tahun), Badan Pusat Statistik (2020)



Ketiga dimensi tersebut berinteraksi satu sama lain sebagaimana tampak pada pola hubungan antar dimensi di Gambar 1. Tingkat kesehatan masyarakat akan berdampak pada kemampuannya menjalani proses pendidikan dan mencari mata pencaharian untuk penghidupannya (Gondek *et al.*, 2018). Sebaliknya kemajuan tingkat pendidikan masyarakat akan berdampak pada penguasaan pengetahuan dan kesadarannya akan pentingnya hidup sehat (Siddiqi *et al.*, 2012). Tingkat pendidikan yang tinggi juga akan membuka akses bagi masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan pekerjaan di sektor formal sekaligus mendapatkan penghasilan yang relatif tinggi (Krueger & Lindahl, 2001; Chivu & Pârgaru, 2012). Pendapatan per kapita masyarakat yang tinggi akan memberi peluang lebih besar untuk mengeluarkan dana pendidikan yang relatif besar sekaligus terlibat dalam proses belajar yang lebih intensif (Breton, 2011). Demikian pula, tingkat pendapatan yang tinggi akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang juga membutuhkan dana yang tidak sedikit (Murphy *et al.*, 2018). Interaksi tersebut

mengimplikasikan bahwa perbaikan pada satu dimensi akan berdampak positif pula bagi dimensi lain, dan sebaliknya.

Kualitas pembangunan sumber daya manusia dalam Negara merupakan aspek penting yang digunakan untuk membedakan klasifikasi Negara maju dan berkembang. Berbagai riset membuktikan bahwa negara-negara berkembang dapat mengejar negara maju melalui peningkatan kualitas pembangunan manusianya (Idrees & Siddiqi, 2013). Preambul Human Development Report pada tahun 1990 dengan jelas menyatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan orientasi utama dari aktivitas pembangunan, dan bukan sebagai alat pembangunan (*United Nation Development Programme*, 1990).

Terkait hal tersebut maka permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana karakteristik yang membedakan sebuah negara maju atau berkembang, mengapa Indonesia belum mampu menjadi sebuah negara maju, permasalahan-permasalahan apa sajakah yang dihadapi Indonesia selama ini, serta strategi apa yang harus dilakukan Indonesia untuk menjadi negara maju. Pembahasan atas masalah-masalah tersebut dibatasi pada aspek pembangunan manusia sehingga konsep yang digunakan untuk menganalisis mengacu pada konsep *Human Development Index* (HDI) yang dikemukakan oleh *The United Nations Development Programme* (UNDP) meliputi dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup penduduk/masyarakat dalam negara.

## **METODE**

Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan adalah studi literatur atau dikenal juga dengan studi kepustakaan yang dilakukan dengan memanfaatkan data-data sekunder yang relevan termasuk berbagai literatur dan hasil riset empiris yang dapat mendukung pembahasan atas masalah yang dikemukakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Negara Maju dan Berkembang dari Sisi Pembangunan Manusia**

Pembangunan sumber daya manusia merupakan proses yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan manusia, memungkinkan untuk memiliki pilihan hidup yang lebih baik dan memperluas peluang hidup (*United Nation Development Programme*, 1990). Di negara berkembang, tantangan yang dihadapi bersifat kompleks. Negara-negara ini memiliki tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah yang kemudian bekerja di sektor-sektor yang kurang memanfaatkan ketrampilan mereka atau bahkan berakhir sebagai pengangguran. Kondisi ini merupakan bentuk mis-alokasi dan pemborosan sumber daya. Tidak demikian halnya di Negara maju (Naz & Ahmad, 2018).

Terkait dengan dimensi kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization, 2020) mendefinisikan kesehatan sebagai keadaan fisik, mental dan sosial individu yang baik dan menguntungkan. Negara bertanggung jawab memfasilitasi masyarakatnya mendapatkan akses atas kesehatan fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya. Elmawazini *et al.*, (2019) memperluas determinan sosial dari kesehatan

dengan konsep rasio beban ketergantungan usia (*age dependency ratio*) sebagai indikator dari determinan sosial kesehatan yang menunjukkan besarnya persentase penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang dan jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Berdasarkan hasil riset ditemukan fakta bahwa sebagian besar negara berkembang memiliki pengeluaran publik untuk kesehatan yang relatif kecil dibandingkan negara maju (Mohapatra, 2017) dan rasio beban ketergantungan yang tinggi (Elmawazini *et al.*, 2019). Ketidaksetaraan pelayanan kesehatan masyarakat juga menjadi isu kental di negara berkembang. Belum meratanya fasilitas kesehatan dan kebijakan yang tumpang tindih terkit pihak yang berwenang memberikan pelayanan kesehatan diidentifikasi menjadi salah satu sumber masalah kesehatan di negara berkembang, dan tidak demikian halnya dengan negara maju (Elmawazini *et al.*, 2019).

Australia sebagai contoh negara maju yang memiliki sistem jaminan kesehatan terbaik kedua di dunia misalnya memberikan pelayanan kesehatan berkualitas tinggi campuran peran pemerintah dan swasta. Akses pelayanan kesehatan yang dikelola pemerintah Australia bebas biaya, namun masyarakat juga dapat menggunakan asuransi dari pihak swasta. Sistem kesehatan di Australia telah mencapai Universal Health Coverage dan sistem pembiayaan kesehatan di Australia berasal dari pajak, sehingga pelayanan untuk masyarakat sama tidak ada perbedaan kelas premi (Putri, 2017). Rasio beban ketergantungan usia yang tinggi akan berdampak pada ketidakstabilan fiskal dan makroekonomi yang pada gilirannya akan berdampak negatif terhadap produktivitas, pertumbuhan ekonomi demikian pula pendapatan per kapita masyarakat.

Pendidikan di negara maju dan berkembang juga memberikan gambaran yang relatif berbeda. Kualitas pendidikan diidentifikasi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal penguasaan pengetahuan dan ketrampilan, dan menumbuhkan nilai-nilai liberalisasi dalam hal otonomi dan kebebasan pribadi (Hiel *et al.*, 2018). Pendidikan juga secara makro dapat memacu inovasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Krueger & Lindahl, 2001) bermuara pada pendapatan per kapita masyarakat. Sistem pendidikan diidentifikasi berhasil dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di negara-negara maju dibandingkan negara berkembang (Hanushek & Kinko, 2000). Partisipasi dalam pendidikan berkontribusi pada perbedaan tingkat ekonomi antar negara. Individu di negara maju yang berpartisipasi lebih tinggi dalam pendidikan, akan memiliki pemikiran yang lebih liberal yang dapat meningkatkan inovasi negara, dan tidak demikian halnya di negara berkembang (Hiel *et al.*, 2018). Penduduk di negara-negara berkembang umumnya cenderung memiliki pandangan dunia yang lebih tertutup, konservatif dengan penekanan pada nilai - nilai tradisional dan keamanan ekonomi dan fisik.

Pembahasan tentang standar hidup terkait dengan pendapatan nasional bruto per kapita. Pendapatan nasional per kapita adalah salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu negara (Leipert, 1989). Gambaran di negara-negara maju dan berkembang terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi memberikan deskripsi yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan rasio beban ketergantungan yang tinggi merupakan masalah utama yang dihadapi oleh negara berkembang. Investasi asing langsung juga memberi efek positif bagi pertumbuhan ekonomi baik di negara maju maupun berkembang namun pengaruhnya bervariasi. Negara-negara berkembang mendapatkan efek yang lebih kecil dari investasi

asing langsung karena lingkungan kelembagaan yang tidak transparan, ekonomi yang tidak sehat, kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai dan pengaruh negatif dari faktor non-ekonomi lainnya (Markovskaya & Anoshkina, 2016). Bahkan investasi asing langsung dapat menjadi jebakan bagi negara berpendapatan menengah ke bawah (Kabir & Ahmed, 2019) yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti organisasi publik di negara maju, kinerja organisasi publik di negara berkembang Asia, termasuk Indonesia juga selalu menjadi sorotan. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2019 (*Corruption Perception Index/CPI*) adalah 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara. CPI Indonesia masih di bawah rata-rata skor CPI dunia yaitu 43 poin. Selain Indonesia, terdapat lima negara lain yang memiliki skor sama seperti Indonesia, yaitu Burkina Faso, Guyana, Lesotho, Trinidad and Tobago, serta Kuwait. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Denmark dan New Zealand berada di tingkat pertama dengan perolehan skor 87, dan Somalia masih berada di posisi terendah dengan perolehan skor 9 (Transparency International, 2020).

Pengeluaran publik untuk pendidikan juga relatif kecil padahal investasi pendidikan tidak hanya dapat meningkatkan modal manusia tetapi juga membantu dalam implementasi teknologi baru sehingga meningkatkan efisiensi (Idrees & Siddiqi, 2013). Sumber daya manusia terdidik dan memiliki kompetensi akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan di sektor formal yang memberikan peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Gao, 2006). Sedangkan negara-negara maju memungkinkan untuk mendapatkan efek yang lebih besar atas investasi asing langsung. Negara-negara maju juga fokus pada penciptaan lapangan kerja yang berkontribusi pada kinerja ekonomi, peningkatan kualitas hidup dan inklusi sosial, dan menjadikannya salah satu pilar utama pembangunan dan kesejahteraan sosial ekonomi. Berbagai upaya fokus pada peningkatan daya saing, restrukturisasi, modernisasi dan pengembangan bisnis bernilai tambah, bio-ekonomi dan ekonomi sirkuler, investasi pendidikan dan transfer pengetahuan (Mirela-Adriana, 2016).

Salah satu strategi penciptaan lapangan kerja yang efektif meningkatkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi adalah aktivitas kewirausahaan. Di negara-negara maju, dukungan signifikan diberikan kepada wirausahawan dalam bentuk kursus pengembangan bisnis melalui universitas dan sistem pelatihan lainnya yang berorientasi pada membentuk mental dan *mind-set* wirausaha, hibah dan kebijakan pemerintah yang mempromosikan dan mendukung kewirausahaan dan juga melalui institusi yang mapan yang dapat menyediakan dana dan jaringan kerja yang lebih luas seperti bank dan dana modal ventura. Fasilitas, hibah, dan lembaga pelatihan ini biasanya kurang di negara-negara berkembang sehingga menimbulkan dampak negatif pada sikap kewirausahaan. Di negara-negara berkembang, para pengusaha menjalankan aktivitas wirausaha sekedar untuk membantu ekonomi keluarga karena terbatasnya mengakses lapangan kerja formal. Berbagai kendala kebijakan, keuangan dan kelembagaan ada di negara-negara berkembang menjadi tantangan untuk berkembangnya kewirausahaan dengan optimal (Doran *et al.*, 2018).

### **Permasalahan Indonesia dalam Aspek Pembangunan Manusia**

Dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat dalam konsep pembangunan manusia terkait erat dengan masalah keadilan (ekuitas). Bagaimana berbagai kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah terkait dimensi-dimensi tersebut

dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Prinsip ekuitas menurut WHO adalah upaya untuk tidak memunculkan di antara kelompok orang, baik kelompok sosial, ekonomi, demografis atau geografis (*World Health Organization*, 2000). Untuk mengatasi masalah disparitas pelayanan kesehatan lintas geografis dan kelompok sosial ekonomi khususnya di wilayah Indonesia Timur dan pedesaan (Pardosi *et al.*, 2017), maka Indonesia menetapkan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menyatukan semua skema asuransi kesehatan utama di Indonesia (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, dan Jamkesda) di bawah satu manajemen/badan hukum Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2015; Pisani & Olivier Kok, 2017; Habibie *et al.*, 2017). Sistem kesehatan terkait dengan banyak aspek antara lain personalia, lembaga, komoditas, informasi, pembiayaan dan strategi dalam memberikan layanan pencegahan dan pengobatan kepada masyarakat (Putri, 2017).

Saat ini sistem kesehatan Indonesia sudah menuju ke arah yang lebih baik. Pemerintah berupaya untuk memenuhi alokasi anggaran 5% dari APBN sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Data menunjukkan bahwa rasio realisasi anggaran kesehatan terhadap total belanja negara semakin meningkat, dari sebesar 2,9% di tahun 2010 hingga 5,0% di tahun 2019, bahkan di tahun 2020 dianggarkan sebesar 5,2% dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Namun cakupan jaminan kesehatan belum sepenuhnya sampai ke seluruh masyarakat. Saat ini, persentase penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat baru mencapai 79,44% dari keseluruhan jumlah penduduk di Indonesia yaitu 261.890.900 jiwa, % balita yang pernah mendapatkan imunisasi campak di tahun 2017 baru mencapai 70,67%, persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif di Indonesia baru mencapai 44,36% di tahun 2018, Angka Kematian Neonatal (AKN) dan angka kematian bayi per 1000 kelahiran di tahun 2017 mencapai 15 orang (Badan Pusat Statistik, 2020).

Berbagai permasalahan yang ada di Indonesia terkait pelayanan dasar kesehatan (Putri, 2017; Habibie *et al.*, 2017; Pardosi *et al.*, 2017) adalah masih kurangnya tenaga kesehatan, akses pelayanan kesehatan yang kurang merata, pembiayaan kesehatan yang kurang merata, inefisiensi dalam pengelolaan pembiayaan dan alokasi dana kesehatan, fasilitas kesehatan yang kurang lengkap, serta tumpang tindih regulasi dan kelembagaan yang memberikan pelayanan kesehatan. Sebagai contoh, Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan dasar masyarakat berada di bawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri bukan Kementerian Kesehatan. Padahal definisi Posyandu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu lebih berkonteks kesehatan (terkait erat dengan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi) dan logisnya lebih tepat ada di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan. Pelayanan kesehatan Indonesia juga belum menjangkau pekerja sektor informal secara merata dan kurang intensifnya kampanye untuk mengedukasi dan membuat masyarakat 'melek' asuransi kesehatan (Dartanto *et al.*, 2016).

Masalah kesehatan di Indonesia ditenggarai terkait erat dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistik (2020) terkait angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup menurut tingkat pendidikan ibu membuktikan

bahwa ibu yang tidak sekolah dan tamat SD mengalami kematian bayi setelah dilahirkan sebanyak 140 orang sedangkan ibu yang tamat SMA dan perguruan tinggi mengalami kematian bayi setelah dilahirkan sebanyak 55 orang. Ini berarti semakin tinggi tingkat pendidikan ibu maka semakin baik pemahamannya akan kesehatan dan sebaliknya. Demikian pula pada aspek kesejahteraan masyarakat, dari seluruh jumlah penduduk di Indonesia diketahui bahwa proporsi populasi penduduk yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan di tahun 2019 hanya mencapai 77,39 %. Semakin rendah pendapatan masyarakat maka semakin tinggi proporsi penduduk yang tidak memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pendidikan merupakan pilar penting penentu masa depan bangsa. Kualitas *human capital* sangat tergantung dari kualitas pendidikan yang kemudian akan berdampak pada kemampuan ekonomi individu (kemiskinan/kesejahteraan). Pendidikan terkait erat dengan kemampuan ekonomi individu (kemiskinan/kesejahteraan). Riset membuktikan bahwa literasi individu atas akses ekonomi terkait erat dengan tingkat pendidikan dan penguasaan pengetahuannya (Jappelli, 2010). Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas, relevansi, dan daya saing. Keseriusan pemerintah Indonesia pada aspek pendidikan juga dapat dilihat dari besarnya pengalokasian anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi yaitu sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara. Beberapa kelemahan teridentifikasi terkait sistem pengelolaan sektor pendidikan oleh negara.

Data menunjukkan bahwa rasio anggaran pendidikan dari total APBN di Indonesia bersifat fluktuatif dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2010, besar rasio anggaran pendidikan sebesar 20,8%, kemudian mencapai rasio realisasi tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 21,7%, dan pada tahun 2019 mencapai 20% (Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia berdampak negatif pada berkembangnya disparitas antar wilayah dalam hal pengeluaran publik untuk dana pendidikan per siswa. Daerah yang menerima Dana Alokasi Umum (DAU) lebih besar per kapita cenderung mengalokasikan dana pendidikan yang lebih besar dibandingkan wilayah yang mendapatkan DAU lebih kecil (Subroto, 2007).

OECD/ADB (2015) juga mengidentifikasi bahwa permasalahan utama sektor pendidikan di Indonesia secara garis besar terkait masalah pemerataan, partisipasi, kualitas, dan efisiensi. Fasilitas sekolah formal di semua level belum tersebar secara merata atau proporsional di setiap desa. Diketahui bahwa dari keseluruhan 83.931 wilayah desa di Indonesia pada tahun 2018, jumlah desa yang memiliki fasilitas Sekolah Dasar mencapai 86,07%, fasilitas Sekolah Menengah Pertama 44,45 %, fasilitas Sekolah Menengah Atas/Kejuruan 12,40%, dan hanya 3,56% untuk kesediaan fasilitas Perguruan Tinggi (Badan Pusat Statistik, 2020). Data rasio partisipasi kasar sekolah dasar di Indonesia relatif tidak stabil dan cenderung meningkat dari 105,96 % di tahun 2015 menjadi 106,411% di tahun 2018 (The World Bank, 2020b). Demikian pula untuk sekolah menengah atas dari 77,39% di tahun 2015 menjadi 79,94% di tahun 2019, dan perguruan tinggi dari 20,89% di tahun 2015 menjadi 25,13% di tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Ini berarti, pada setiap level pendidikan meliputi siswa yang kelebihan dan kekurangan umur. Siswa di Indonesia yang sekolah tidak sesuai usia dengan level pendidikannya kecenderungannya meningkat. Selain itu, lebih dari 50% penduduk usia 15 tahun belum menguasai ketrampilan dasar seperti membaca atau matematika (OECD/ADB, 2015), bahkan 14,78% dari

keseluruhan penduduk mengalami buta huruf (Badan Pusat Statistik, 2020). Di era *digital* saat ini, pendidikan di Indonesia juga relatif masih rendah dalam mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi dan komputer. Proporsi remaja dan dewasa usia 15-59 tahun dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) di Indonesia di tahun 2019 baru mencapai 58,22%, (Badan Pusat Statistik, 2020). Pendidikan di Indonesia juga belum serius berorientasi pada penciptaan penguasaan pengetahuan (kompetensi) sekaligus kemandirian siswa khususnya untuk bekerja di sektor informal (kewirausahaan) (Imaroh, 2016).

Standar hidup masyarakat yang diukur dari pendapatan nasional per kapita terkait erat dengan kondisi sosial, politik, ekonomi dalam negara. Kemiskinan masih menjadi masalah utama yang harus diatasi di Indonesia terutama di pedesaan, walaupun mengalami penurunan sejak 20 tahun terakhir (Dawood *et al.*, 2019). Kemiskinan terkait erat dengan ketimpangan pendapatan, tingkat pengangguran dan pendidikan. Kemiskinan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia dipengaruhi oleh akses masyarakat miskin yang rendah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan. Rendahnya motivasi masyarakat untuk sekolah dan rendahnya tingkat pendidikan berpengaruh pada rendahnya produktivitas kerja dan bermuara pada rendahnya pendapatan keluarga. Strategi pengurangan kemiskinan di Indonesia adalah program nasional, akan tetapi tidak ditargetkan dengan baik penanggulangannya (Rasyid *et al.*, 2018).

Secara keseluruhan, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 24,79 juta jiwa. Tingkat kemiskinan di pedesaan di tahun 2018 sebesar 9,66% menurun menjadi 9,22% di tahun 2019, sedangkan di perkotaan sebesar 6,89% di tahun 2018 menurun menjadi 6,56% di tahun 2019 (Badan Pusat Statistik, 2020). Kemiskinan di Indonesia disumbang utamanya oleh sumber penghasilan utama keluarga dari sektor pertanian dibandingkan industri dan ada ketimpangan besar pendapatan antara kedua sektor tersebut. Di tahun 2017, ada sebesar 49,89% rumah tangga miskin yang sumber penghasilan utama rumah tangganya dari sektor pertanian, sedangkan dari sektor industri hanya 7,12%. Kemiskinan juga ditentukan oleh capaian tingkat pendidikan kepala rumah tangga. Sebanyak 74,9% kepala rumah tangga berpendidikan tidak tamat SD dan SD yang mengalami kemiskinan, sedangkan kepala rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi hanya 0,73% yang miskin (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pendapatan masyarakat juga dipengaruhi oleh peluang bekerja (kondisi dunia usaha) yang tersedia dalam negara. Kondisi dunia usaha tergambar dari capaian Produk Domestik Bruto/*Gross Domestic Product* (PDB/GDP). PDB Indonesia pada tahun 2016 sebesar Rp 9.433.034,4 Milyar dan Rp 36.462,5 Ribu PDB per kapita (Badan Pusat Statistik, 2020). Menurut data lembaga Internasional, besar GDP Indonesia cenderung mengalami peningkatan sejak tahun 2015 sebesar US\$860,854 Billion menjadi US\$931,877 di tahun 2016 Billion, dan US\$ 1.042 Triliun di tahun 2018 (The World Bank, 2020b). Sebagai perbandingan dengan Indonesia, negara-negara maju seperti Amerika Serikat memiliki nilai GDP di tahun 2016 sebesar US\$ 19 triliun, Cina sebesar US\$ 12 triliun, dan Jepang sebesar US\$ 4,3 triliun. Ini berarti besar GDP Indonesia masih relatif rendah dibandingkan GDP negara maju.

Hidupnya dunia usaha ditentukan antara lain oleh banyaknya investasi di Indonesia. Saat ini investasi asing langsung di Indonesia masih relatif terbatas disebabkan karena hambatan regulasi, iklim dunia usaha yang kurang kondusif, ketidaksiapan negara menyediakan sarana dan prasarana pendukung serta tata kelola birokrasi yang buruk

(Gopalan *et al.*, 2016; Riwayati, 2017). Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar yang paling "menjanjikan" untuk investor, sementara pasar negara berkembang lainnya seperti Cina dan India berada di posisi sepuluh besar (UNCTAD, 2015). Padahal kebutuhan akan investasi asing langsung bagi Indonesia sangat mendesak mengingat kultur kewirausahaan di Indonesia yang relative lemah dibandingkan negara-negara berkembang lainnya termasuk India. Sebagai bagian dari negara G-20, Indonesia menduduki peringkat ke 18 di bawah India dalam barometer kewirausahaan digital dunia (The Ernst and Young, 2017). Padahal kewirausahaan adalah mesin pertumbuhan ekonomi negara (Holcombe, 1998) yang memiliki keberlanjutan paling kuat dan *impact* yang besar bagi kemandirian ekonomi masyarakat (Imaroh, 2016).

### **Strategi Indonesia Menuju Negara Maju dalam Aspek Pembangunan Manusia**

Indonesia masih harus menyelesaikan banyak pekerjaan agar dapat menjadi negara maju antara lain dengan strategi peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat sebagai persyaratan dasar pembangunan manusia secara komprehensif dan integratif. Secara umum, strategi utama yang harus dilakukan terkait ketiga dimensi tersebut adalah meningkatkan kualitas, memperluas partisipasi (keadilan), dan efisiensi dalam pengelolaan sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sektor lainnya yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap ketiga sektor tersebut. Kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas tenaga pengajar. Pemerintah perlu lebih serius berupaya meningkatkan kapasitas profesional tenaga pengajar termasuk di sektor kesehatan, melalui kebijakan berorientasi pengembangan kompetensi guru dan dosen. Dari sisi materi ajar, perhatian lebih diberikan pada relevansi pendidikan untuk pekerjaan dan pengembangan ekonomi. Indonesia membutuhkan sistem pendidikan kejuruan yang lebih beragam dan terkoordinasi secara nasional dengan tingkat keterlibatan dunia usaha yang tinggi. Kapasitas akreditasi lembaga pendidikan dan kesehatan di setiap tingkatan harus diperkuat dan diperlukan regulasi yang lebih kuat untuk mengatasi rendahnya kualitas penyedia layanan. Diperlukan kebijakan dan investasi untuk internasionalisasi penelitian guna peningkatan kapasitas di perguruan tinggi. Peningkatan alokasi pendanaan publik untuk sektor pendidikan dan kesehatan perlu dikombinasikan dengan upaya efisiensi yang berorientasi pada peningkatan kualitas. Pengawasan dalam bentuk audit sangat perlu dilakukan untuk memastikan alokasi anggaran efektif dan efisien. Di samping berbagai hal tersebut, peningkatan kompetensi sumber daya manusia Indonesia melalui pendidikan yang berorientasi menumbuhkan kemandirian dan kreativitas (inovasi) melalui materi kurikulum yang tidak terpaku pada pembelajaran di dalam kelas dan target kinerja siswa yang *strict* (kaku). Penguasaan teknologi siswa di semua level pendidikan juga diperkuat agar lulusan memiliki daya saing global. Pengetahuan kewirausahaan penting ditanamkan sebagai bagian dari pembelajaran karakter siswa di semua level pendidikan baik formal maupun informal, di pedesaan maupun perkotaan, sebagai solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan nasional. Pendidikan dapat sebagai strategi mengurangi kemiskinan khususnya di pedesaan. Pendidikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan strategi penting meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Peran pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berkembangnya bisnis penting dikondisikan. Aspek keamanan lingkungan, perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur, perlindungan hukum bagi pebisnis antara lain hak cipta, tata kelola yang baik, reformasi birokrasi (debirokratisasi), penyederhanaan perijinan,

harmonisasi kebijakan antar lembaga pemerintah dan atar pusat dan daerah, akuntabilitas manajemen keuangan sektor publik dan manajerialisme dalam birokrasi pemerintah yang merupakan pengadopsian cara kerja di instansi swasta yang memungkinkan birokrasi pemerintah dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Kebijakan publik yang selaras satu sama lain sangat efektif untuk mengungkit pembangunan nasional (Osborne and Plastrik, 1998). Konsep-konsep tersebut mengacu pada konsep *New Public Management* sebagai filsafat manajemen pelayanan publik baru yang memberi penekanan pada transparansi, manajemen kinerja dan akuntabilitas pegawai dan pemimpin sektor publik (Lynn, 2006; Hayer, 2010).

Selanjutnya bantuan pendanaan bagi usaha mikro (akses ekonomi), berbagai insentif, pelatihan dan program kemitraan, akses pasar, yang mendukung berkembangnya kewirausahaan di masyarakat berpendapatan rendah perlu diberikan agar usaha mikro dan menengah di masyarakat tidak hanya berskala kecil terus dan bersifat lokal. Bimbingan teknis untuk penguasaan teknologi juga perlu diintensifkan untuk memberi peluang usaha kecil dan menengah masyarakat dapat menembus pasar Internasional. Teknologi merupakan hal penting yang diperlukan untuk memperoleh pengembangan ekonomi lokal dan berperan untuk efisiensi bisnis. Pemerintah juga perlu membuka diri untuk investasi asing langsung yang lebih luas. Investasi *greenfield* domestik dan asing penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Investasi *greenfield* adalah investasi dalam bentuk pendirian unit-unit produksi baru dimana modal asing sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan atau investor asing di negara penerima investasi tersebut. Investasi *greenfield* diidentifikasi sebagai bentuk investasi yang relatif lebih tahan lama daalam meningkatkan pertumbuhan aliran modal dibandingkan dengan bantuan perbankan (Gopalan *et al.*, 2016). Hubungan bilateral dan multilateral dengan negara-negara investor perlu diintensifkan untuk mendukung gerakan meningkatkan Pertumbuhan ekonomi negara.

## KESIMPULAN

Negara maju dan berkembang memiliki karakteristik yang berbeda dalam aspek pembangunan manusia terkait dengan dimensi kesehatan, pendidikan dan standar hidup masyarakat. Secara umum, negara maju memiliki tingkat kesehatan, pendidikan, dan standar hidup yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang. Kondisi tersebut karena pemerintahnya mengeluarkan dan mengimplementasikan berbagai kebijakan publik yang kondusif untuk kondisi tersebut terwujud. Sementara negara berkembang, memiliki banyak hambatan dan keterbatasan utamanya yang berasal dari faktor intenal, antara lain keterbatasan anggaran, infrastruktur, cara pandang masyarakat yang cenderung lebih tertutup, konservatif dengan penekanan pada nilai - nilai tradisional dan keamanan ekonomi dan fisik, pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan rasio beban ketergantungan yang tinggi, berkenaan dengan kualitas kebijakan dan birokrasi pemerintah pelayan publik dan berbagai hal lainnya. Berdasarkan hal-hal tersebut, Indonesia masih lebih tepat dikategorikan sebagai negara berkembang. Permasalahan yang dihadapi Indonesia dalam ketiga dimensi tersebut secara umum mencakup aspek pemerataan akses (keadilan), kualitas, relevansi, dan daya saing. Karenanya strategi peningkatan akses (pemerataan) pendidikan, kesehatan dan standar hidup serta berbagai upaya untuk meningkatkan kualitasnya dilakukan Indonesia secara komprehensif dan integratif sebagai syarat utuk menjadi negara maju, antara lain meningkatkan kualitas lembaga pendidikan dan tenaga

pengajar sesuai standar Internasional yang memberi peluang untuk siswa dapat berkreativitas sekaligus menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa mandiri bekerja dan meningkatkan taraf hidupnya serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga berperan penting untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kapabilitas kelembagaan pelayanan publik berorientasi pada pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan kebutuhan dasar masyarakat. Sedemikian kompleksnya determinan pembangunan manusia, tidak memungkinkan dibahas secara keseluruhan di artikel ini. Karenanya, diperlukan penelitian lanjutan terkait indikator kompleks dalam aspek pembangunan manusia di suatu negara yang belum teramati dan dibahas dalam artikel ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agussalim, D. (2019). Contending images of world politics: penelusuran kritis terhadap asal-usul dan perdebatan mengenai konsep 'developing countries'. *Jurnal Hubungan Internasional*, 8(1), 97-112. <https://doi.org/10.18196/hi.81148>.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Diakses 01 Juni, 2020. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).
- Breton, T. R. (2011). Does investment in schooling raise national income? evidence from cross-country studies. *Ecos de Economía*, 15(32), 99-120.
- Chivu, M.; Pârgaru, I., (2012). Investment in education-economic growth factor. Suppl. *The Proceedings of The International Conference, Acces la Success; Bucharest*, 13(3), 424-431.
- Dartanto, T.; Rezki, J. F.; Pramono, W.; Siregar, C. H.; Usman; Bintara, H. (2016). Participation of informal sector workers in Indonesia's national health insurance system. *Journal of Southeast Asian Economies*, 33(3), 317-42. DOI: 10.1355/ae33-3c.
- Dawood, T.C., Pratama, H., Masbar, R., & Effendi, R. (2019). Does financial inclusion alleviate household poverty? Empirical evidence from Indonesia. *Economics and Sociology*, 12(2), 235-252. doi:10.14254/2071-789X. 2019/12-2/14.
- Doran, J.; McCarthy, N.; O'Connor, M. (2018). The role of entrepreneurship in stimulating economic growth in developed and developing countries. *Cogent Economics & Finance*, 6(1). DOI:10.1080/23322039.2018.1442093.
- Elmawazini, K.; Manga, P.; Nwankwo, S.; AlNaser, B. (2019). Health gap between developed and developing countries: Does globalization matter? *Econ Change Restruct*, 52, 123-138. DOI: 10.1007/s10644-017-9219-0.
- Gao, S. (2006). Building causal connections among job accessibility, employment, income, and auto ownership using structural equation modeling: a case study in Sacramento Count [Dissertations]. University of California.
- Gondek, D.; Ke Ning; Ploubidis, G. B.; Nasim, B.; Goodman, A. (2018). The impact of health on economic and social outcomes in the United Kingdom: A scoping literature review. *PLoS One*, 13(12), e0209659. DOI:10.1371/journal.pone.0209659.
- Gopalan, S.; Hattari, R.; Rajan, R. S. (2016). Understanding foreign direct investment in Indonesia. *Journal of International Trade Law and Policy*, 15(1), 28-50. DOI 10.1108/JITLP-01-2016-0003.

- Habibie, W. L.; Hardjosoekarto, S.; Kasim, A. (2017). Health reform in Indonesia towards sustainable development growth (case study on BPJS Kesehatan, Health Insurance in Indonesia). *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(3), 375-383.
- Hanushek, EA, Kinko, DD (2000) Schooling, labor-force quality, and the growth of nations. *Am Econ Rev*, 90, 1184-1208.
- Hayer, G. D. (2010). New public management: A strategy for democratic policy reform in transitioning and developing countries. *An International Journal of Police Strategies & Management*, 34(3), 419-433.
- Hiel, A. V.; Assche, J. V.; De Cremer, D.; Onraet, E.; Bostyn, D.; Haesevoets, T.; Roets, A. (2018). Can education change the world? Education amplifies differences in liberalization values and innovation between developed and developing countries. *PLoS One*, 13(6), e0199560. DOI:10.1371/journal.pone.0199560.
- Holcombe, R. G. (1998). Entrepreneurship and Economic Growth. *The Quarterly Journal of Austrian Economics*, 1, 45-62.
- IDNFinancial. (2020). USTR considers Indonesia as a developed country. News, Feb 24, 2020. <https://www.idnfinancials.com/news/32191/ustr-considers-indonesia-developed-country>, diakses Mei 30, 2020.
- Idrees, A. S.; Siddiqi, M. W. (2013). Does public education expenditure cause economic growth? comparison of developed and developing countries. *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences*, 7(1), 174-183.
- Imaroh, T. S. (2016). Entrepreneurship education as a strategy for improving the economical independence and competitive ability of society in Asean Economic Community (AEC) Era. *The International Journal of Organizational Innovation*, 9(2), 287-294.
- Jappelli, T. (2010). Economic literacy: An international comparison. *The Economic Journal*, 120(548), 429-451.
- Joshi, R. M. (2009). International business. England: Oxford University Press.
- Kabir, M A.; Ahmed, A. (2019). An empirical approach to understanding the lower-middle and upper-middle income traps. *International Journal of Development Issues*, 18(2), 171-190. DOI:10.1108/IJDI-09-2018-0138.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Health financing and universal health coverage: policy Briefs. Indonesia: Australia Indonesia Partnership for Health Systems Strengthening.
- Leipert, C. (1989). National income and economic growth: the conceptual side of. *Journal of Economic Issues*, 23(3), 843.
- Lynn, L. E. (2006). *Public Management Old and New*. Routledge. New York.
- Markovskaya, E. I.; Anoshkina, E. S. (2016). Analysis of the impact of foreign direct investments on the economic growth in developed and developing countries. *St. Petersburg State Polytechnical University Journal*, 6, n/a. DOI:10.5862/JE.256.2.
- Mirela-Adriana, R. (2016). Key policies and socio-economic growthfactors of rural areas in the European Union [Paper Presentation]. In International Symposium of Agrarian Economy and Rural Development: Realities and Perspectives for Romania, Bucharest, (pp. 388-395). The Research Institute for Agriculture Economy and Rural Development.

- Mohapatra, S. (2017). Health inequity and health outcome: a causal linkage study of low and middle income countries. *Quality and Quantity*, 51(6), 2475-2488. DOI:10.1007/s11135-016-0404-4.
- Murphy, R; Stewart, A W; Hancox, R J; Wall, C R; Braithwaite, I; Beasley, R.; Mitchell, E. A.; and the ISAAC Phase Three Study Group. (2018). Obesity, underweight and BMI distribution characteristics of children by gross national income and income inequality: results from an international survey. *Obesity Science & Practice*, 4(3), 216-228. DOI:10.1002/osp4.169.
- Naz, A.; Ahmad, E. (2018). Driving factors of globalization: an empirical analysis of the developed and developing countries. *Business and Economic Review*, 10(1), 133-157. DOI:10.22547/BER/10.1.6.
- Nielsen, L. (2011). *Classifications of countries based on their level of development: how it is done and how it could be done*. IMF Working Paper, February.
- OECD (2003), Checklist for Foreign Direct Investment Incentive Policies, OECD.
- OECD/ADB. (2015). Reviews of national policies for education: education in Indonesia-Rising to the challenge.
- Osborne, D., Plastrik, P. (1998). *Banishing bureaucracy: the five strategies for reinventing government*. New York: A Plume Book.
- Pardosi, J. F.; Parr, N.; Muhidin, S (2017) Local government and community leaders' perspectives on child health and mortality and inequity issues in rural Eastern Indonesia. *Journal of Biosocial Science*, 49(1), 123-146. DOI:10.1017/S0021932016000134.
- Peraturan Menteri Dlm Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu
- Pisani, E., Olivier Kok, M. (2017). Nugroho K. Indonesia's road to universal health coverage: a political journey. *Health Policy Plan*, 32(2), 267.
- Portal Data APBN Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Anggaran Kesehatan dan Pendidikan*. Diakses 01 Juni, 2020. <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id>
- Putri, R. N. (2017). Perbandingan sistem kesehatan di negara berkembang dan negara maju. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 139-146. DOI 10.33087/jiubj.v19i1.572.
- Rasyid, R.; Dirawan, G. D.; Umar, R.; Pertiwi, N. (2018). Poblemand solution of poverty household in Makassar City, Indonesia. *Academy of Strategic Management Journal*, 17(6), 1-7.
- Riwayati, H. E. (2017). Analysis banking role to performance improvement on Indonesia small medium enterprises. *European Research Studies Journal*, XX(3A), 717-728.
- Siddiqi, A.; Kawachi, I.; Berkman, L.; Hertzman, C.; Subramanian, S. V. (2012). Education determines a nation's health, but what determines educational outcomes? A cross-national comparative analysis. *Journal of Public Health Policy*, 33(1), 1-15. DOI:10.1057/jphp.2011.52.
- Subroto, P. (2007). Financing education sector under the current decentralized system in Indonesia: disparities in education expenditures per student at public junior secondary schools. *Dissertation*, University of Pittsburgh.
- The Ernst and Young. (2017) The EY G20 Digital Entrepreneurship Barometer Rankings 2016. Diakses 01 Juni, 2020. [https://www.ey.com/en\\_gl/growth/how-to-help-young-entrepreneurs-succeed](https://www.ey.com/en_gl/growth/how-to-help-young-entrepreneurs-succeed).

- The World Bank. (2020a). The World Bank in Middle Income Countries. Diakses 01 Juni, 2020. <https://www.worldbank.org/en/country/mic/overview#1>.
- The World Bank. (2020b). <https://www.data.worldbank.org>, Diakses 01 Juni, 2020.
- Transparency International. (2020). Corruption Perceptions Index 2019. Diakses 05 Juni 2020. <https://www.transparency.org/en/cpi/2019#>.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- United Nations Development Programme (1990), Human Development Report.
- United Nations Development Programme. (2019). Human Development Report 2019: beyond income, beyond averages, beyond today: inequalities in human development in the 21st century. <http://hdr.undp.org/en/2019-report>.
- UNCTAD (2015), World Investment Report 2015, United Nations, Geneva.
- Vázquez, S. T.; Sumner, A. (2016). Is the 'developing world' changing? a dynamic and multidimensional taxonomy of developing countries. *European Journal of Development Research*, 28(5), 847–874. DOI:10.1057/ejdr.2015.57.
- World Health Organization. (2000). World Health Report 2000. Health Systems: Improving Performance. Geneva: World Health Organization; 2000.
- World Health Organization. (2020). What is the WHO definition of health? Diakses 01 Juni, 2020. <https://www.who.int/about/who-we-are/frequently-asked-questions>.

